

**Mitigasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam
Menanggulangi Bencana Kebakaran Di Kabupaten Gunungkidul**
*Disaster Mitigation by the Regional Disaster Management Agency in
Addressing Fire Disasters in Gunungkidul Regency*

Limpat Wibowo Aji^{1*)}

¹⁾ Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Gunung Kidul. Email:

limpat.wibowo@ugk.ac.id

*Correspondensi: Email: limpat.wibowo@ugk.ac.id

Received: 08/06/25; Revised: 17/06/25; Accepted: 29/05/25

Abstrak

Indonesia sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana, termasuk bencana kebakaran yang dialami oleh Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mitigasi bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menangani bencana kebakaran di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan informan sebanyak 20 orang. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi sehingga dapat dianalisis dengan menggunakan proses analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan indikator prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul cukup efektif dalam menangani bencana kebakaran. Temuan dalam penelitian ini adalah meskipun telah lama tinggal di daerah rawan bencana, masyarakat dan pemerintah daerah belum menunjukkan kesiapsiagaan bencana sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem yang lebih baik dengan berlandaskan pada integrasi kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat setempat.

Kata kunci : BPBD; mitigasi bencana, kebakaran.

Abstract

Indonesia is very vulnerable to various types of disasters, including fire disasters experienced by Gunungkidul Regency. This study aims to determine the disaster mitigation of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in handling fire disasters in the Gunungkidul Regency area.

This study uses a descriptive qualitative method, with 20 informants. The research data was obtained using interview techniques, observation, and documentation studies so that they can be analyzed using a qualitative data analysis process. This study uses pre-disaster, emergency response, and post-disaster indicators.

The results of the study indicate that disaster management in Gunungkidul Regency is quite effective in handling flash flood disasters. The findings in this study are that even though they have lived in disaster-prone areas for a long time, the community and local government have not shown disaster preparedness, resulting in unavoidable casualties and damage. Therefore, it is necessary to build a better system based on the integration of local wisdom adopted by the local community.

Keywords: BPBD, disaster mitigation, fire.

1. PENDAHULUAN

Bencana alam adalah salah satu fenomena yang dapat terjadi setiap saat, dimanapun dan kapanpun sehingga menimbulkan risiko atau bahaya

terhadap kehidupan manusia, baik kerugian harta benda maupun korban jiwa atau manusia (Sari, 2020). Kebakaran merupakan salah satu jenis bencana yang dapat terjadi secara tiba-

tiba dan menimbulkan kerugian besar, baik terhadap manusia, lingkungan, maupun harta benda. Kebakaran dapat terjadi di permukiman, hutan, lahan pertanian, kawasan industri, dan gedung-gedung publik. Penyebab kebakaran sangat beragam, mulai dari faktor alam seperti cuaca panas ekstrem dan sambaran petir, hingga faktor manusia seperti kelalaian, pembakaran lahan, atau korsleting listrik.

Di Indonesia, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sering terjadi terutama pada musim kemarau, dan menjadi perhatian serius karena dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, serta perekonomian. Asap dari kebakaran dapat mencemari udara, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan menyebabkan gangguan pernapasan. Selain itu, kebakaran juga dapat merusak ekosistem dan mempercepat perubahan iklim akibat pelepasan emisi karbon yang tinggi.

Dalam negara arkipelago terbesar, Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di persimpangan antara dua benua yaitu Asia dan Australia serta dua samudra Pasifik dan Hindia. Ini merupakan titik pertemuan antara dua rangkaian pegunungan yaitu pegunungan sirkum-Pasifik dan sirkum-Mediterrania. Indonesia terletak di daerah tropis yang mengalami panas sepanjang tahun dan memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan kemarau. Kondisi alam yang beragam ini menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Namun, letak geografisnya juga menyebabkan Indonesia rentan terhadap bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi karena kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografisnya yang kompleks (Lutpiani, 2021).

Letak geografis Indonesia adalah posisi suatu wilayah di bumi yang

menentukan hubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6° lintang utara (LU) dan 11° lintang selatan (LS) serta 95° bujur timur (BT) dan 141° bujur timur. Garis lintang adalah garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Dengan berada pada rentang lintang tersebut, Indonesia termasuk dalam wilayah dengan iklim tropis yang ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut: Tingkat hujan yang mencapai tingkat yang signifikan, Kehadiran hujan tropis yang meluas, Penyinaran matahari sepanjang tahun, Kadar kelembaban udara yang tinggi (Nurbidawati, 2019). Selain itu, garis bujur merupakan garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi pada peta atau globe. Garis bujur mempengaruhi waktu lokal suatu negara dengan garis bujur 0o yang terletak di Greenwich. Indonesia terletak antara garis bujur 95° BT hingga 141° BT, sehingga memiliki tiga zona waktu yang berbeda (Hastiningrum, 2019).

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan juga potensi bencana yang signifikan. Kondisi kepulauan Indonesia membuatnya rentan terhadap berbagai jenis bencana yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penanganan yang terstruktur dan koordinasi yang baik. Risiko bencana alam umumnya disebabkan oleh bencana geologi, biologi, kegagalan teknologi, dan interaksi manusia yang terkait dengan persaingan atas sumber daya yang terbatas (R. Rijanta, D.R. Hizbaron, 2018).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Djadjuli (2018) alam Indonesia memiliki potensi kekayaan yang berlimpah, tetapi juga dapat

menjadi penyebab bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun oleh tindakan manusia. Bersamaan dengan perkembangan waktu untuk mengurangi potensi bencana, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 yang membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penanganan masalah kebencanaan alam merupakan tanggung jawab BNPB atas pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana terjadinya. Dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia, sejalan dengan penerapan otonomi daerah dimana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kapasitasnya mengatasi kebencanaan secara mandiri di wilayahnya masing-masing (Mokoginta, et al, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana merupakan serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, atau tindakan manusia, yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan serta merugikan lingkungan sekitarnya (Heryati, 2020). Bencana dapat terjadi tanpa pemberitahuan, kapanpun, dan dimanapun. Untuk mengurangi risiko bencana penting lebih waspada terhadap kemungkinan bencana serta untuk Masyarakat mengetahui langkah-langkah penanggulangan bencana guna mengurangi ancaman dan dampak yang ditimbulkan. Persiapan cepat ketika menghadapi ancaman, keselamatan diri, dan upaya memperbaiki kerusakan yang terjadi semua itu diperlukan agar masyarakat dapat menjadi lebih aman dan mandiri dalam menghadapi bencana (Resdiana & Alfiah, 2020).

Bencana memerlukan upaya penanganan untuk membangkitkan semangat korban dalam memulihkan daerah yang rusak dengan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini dilakukan melalui kegiatan kemanusiaan di dalam dan di luar struktur pelayanan sosial. Tujuannya adalah membantu individu, keluarga, dan komunitas agar dapat beradaptasi sosial dalam memenuhi kebutuhan fisik dan moral serta menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan perannya dalam konteks sosial (Ramadhan, 2023). Bencana alam dianggap sebagai situasi yang menimbulkan tantangan dan masalah terutama berakibat pada aspek kemanusiaan. Sumber dari bencana bisa berasal dari alam maupun tindakan manusia. Ada tiga kategori bencana alam menurut (Manesh, 2019) yaitu: 1) Bencana hidrometeorologis: Merupakan proses atau fenomena alami yang terjadi di atmosfer, hidrologi, atau kaitannya dengan kelautan yang dapat menyebabkan kerugian jiwa, luka-luka, kerusakan properti, gangguan sosial dan ekonomi, atau degradasi lingkungan. Jenis-jenis bencana ini meliputi banjir, gelombang laut, topan, longsor salju, kekeringan, serta bencana terkait suhu ekstrem dan kebakaran hutan atau lahan. 2) Bencana geospasial: Adalah proses alami atau fenomena yang menghasilkan kerugian jiwa, luka-luka, kehilangan tempat tinggal, gangguan ekonomi dan sosial, serta degradasi lingkungan. Contoh bencana geospasial meliputi gempa bumi, tanah longsor, dan letusan gunung. 3) Bencana biologis: merupakan proses yang berasal dari organisme atau yang ditimbulkan oleh faktor biologis, termasuk paparan patogen (penyakit), mikroorganisme, racun, dan zat biologis aktif. Dampak dari bencana ini bisa berupa kematian, luka-luka, kerusakan

rumah, gangguan sosial dan ekonomi, atau degradasi lingkungan. Contoh bencana biologis antara lain epidemi, wabah serangga, atau penyakit yang menyerang binatang.

Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia maupun dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan dan melampaui batas kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana. Menurut UU No. 24 Tahun 2007, manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitas dan rekonstruksi bencana.

Dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana, dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut: 1) Tahap pra bencana yang dilaksanakan ketika sedang tidak terjadi bencana dan ketika sedang dalam ancaman potensi bencana, yang mencakup kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini; 2) Tahap tanggap darurat yang dirancang dan dilaksanakan pada saat terjadi bencana, mencakup tanggap darurat dan bantuan darurat; 3) Tahap pasca bencana yang dalam saat setelah terjadi bencana, mencakup pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.



Gambar 1. Siklus Penanggulangan Bencana

(Sumber:

<https://bpbd.gunungkidulkab.go.id>)

Bencana adalah urusan semua pihak. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul melakukan berbagai kegiatan melalui program kegiatan yang telah direncanakan. Pencapaian target sasaran ini, berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 369/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Guna mencapainya pada tahun anggaran 2024 menargetkan 1 kalurahan terbentuk menjadi kalurahan tangguh bencana. Pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan pada bulan Februari 2024 di Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Ponjong.

Banyaknya kejadian bencana di Indonesia yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia telah menjadi perhatian serius. Salah satu bentuk bencana alam yang secara konsisten mengancam sejumlah wilayah di Indonesia adalah banjir. Data yang disajikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan bahwa antara tahun 2021 hingga akhir 2023, tercatat

sebanyak 2.145 kejadian banjir. Dalam data statistik bencana di Indonesia yang diambil melalui web BNPB menjelaskan bahwa di Indonesia telah terjadi bencana kebakaran mencapai 2.145 terhitung dari tahun 2022 terdapat 1.196 bencana, tahun 2023

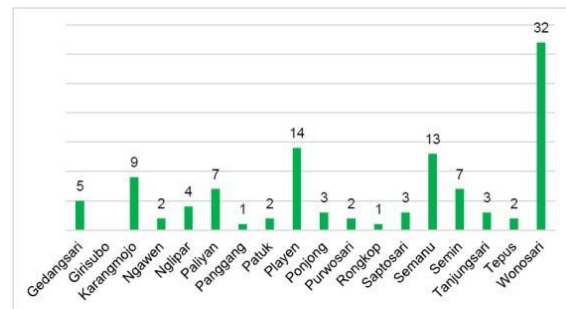
terdapat 598 bencana hingga 2024 terdapat 351 bencana yang dimana dapat ditotalkan menjadi

2.145 bencana kebakaran yang terdapat di Indonesia yang dimana bencana tersebut tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Wilayah yang sering akan bencana banjir paling banyak wilayah yang berada dipulau jawa. Sedangkan menurut statistik BNPB 2024 bencana banjir di Indonesia mencapai 351 bencana, kemudian disusul dengan bencana tanah longsor mencapai 430, bencana banjir dan tanah longsor 22, bencana abrasi 4, bencana puting beliung 325, bencana kekeringan 41, bencana kebakaran hutan dan lahan 2.048 serta bencana gempa bumi 18. Ini dapat diartikan bahwa di Indonesia sangat banyak terjadi bencana alam Dimana bencana yang terbesar di Indonesia ialah bencana kebakaran hutan dan lahan akibat dari ulah manusia yang tidak bertanggungjawab, adapun bencana banjir disini di nomor urutan ke 3 setelah bencana tanah longsor yang terjadi di Indonesia.

Hal ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan daerah yang rentan terhadap bencana kebakaran. Dalam konteks klasifikasi bencana alam secara horizontal, dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu bencana aktual dan bencana potensial. Bencana aktual merupakan peristiwa bencana yang tengah terjadi, bersifat mendadak dan cepat, cenderung melibatkan wilayah terbatas, dan jumlah korban jiwa yang dihasilkan relatif kecil jika dibandingkan

dengan dampak global secara keseluruhan. Informasi ini menjadi relevan dalam menggambarkan kompleksitas dan kerentanan Indonesia terhadap bencana alam khususnya banjir (Sabir & Phil, 2016).

Berdasarkan database kejadian bencana kebakaran sampai dengan triwulan IV tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul terjadi kebakaran sebanyak 111 kejadian dengan Jumlah korban jiwa 193 orang. Sedangkan pada 3 kejadian kebakaran tersebut terdapat warga negara yang terdampak kejadian tersebut (korban jiwa terdampak).



Gambar 2. Grafik Kejadian Kebakaran Pada Setiap Kapanewon Tahun 2024

Sumber : <https://bpbkd.gunungkidulkab.go.id>

Untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran dilakukan penambahan Pos Pembantu Pemadam Kebakaran yang berlokasi di Kecamatan Karangmojo. Pada tahun 2023, melalui DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul, telah dibangun gedung WMK yang terletak di Kapanewon Karangmojo. WMK Karangmojo ditujukan untuk penambahan layanan Wilayah Manajemen Kebakaran yang dilaksanakan secara bertahap guna mendukung pencapaian target indikator amanat SPM. Pada tahun anggaran dilakukan optimalisasi WMK Karangmojo, antara lain; menambah personel melalui mekanisme *outsourcing*, menambah mobil pemadam

kebakaran dan mobil suplay pemadam kebakaran.

Kebakaran merupakan salah satu kasus bencana yang menimbulkan kerugian baik berupa materi, luka bahkan hingga kematian. Peristiwa kebakaran merupakan suatu kejadian yang sering terjadi pada pemukiman warga terutama pada musim kering, terkadang kebakaran terjadi pula pada lahan kosong. Karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul yang cenderung kering menjadikan Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sering mengalami kebakaran. Selain itu, luasan wilayah Kabupaten Gunungkidul yang mencapai hampir 45% dari wilayah DIY ditambah lagi ketersediaan pos pemadam kebakaran yang hanya 1 pos, menjadi tantangan sendiri dalam pencapaian sasaran strategis Peningkatan Manajemen Pengurangan Risiko Bencana/Kebakaran.

Untuk itu dalam mewujudkan sasaran strategis tersebut, BPBD memiliki UPT Pemadam Kebakaran. UPT Pemadam Kebakaran dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor

94 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan sub urusan kebakaran

wajib menyediakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran di UPT Damkarmat Gunungkidul belum sepenuhnya terpenuhi. Sampai dengan triwulan IV Tahun 2024, tersedia 130 unit sarana dan prasarana.

**Tabel 1. Sarana Prasarana
Penanggulangan Kebakaran di
Kabupaten Gunungkidul**

No.	Keterangan	Satuan	Tahun						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	Unit	1	1	1	1	1	1	2
2.	Jumlah kendaraan pemadam kebakaran	Unit	4	4	4	4	4	4	6
3.	Jumlah Petugas pemadam kebakaran	Orang	24	24	24	24	24	24	24 THL 6 outsourcing

Sumber : <https://bpbdd.gunungkidulkab.go.id>

Pada tahun anggaran 2024, guna meningkatkan pelayanan pengurangan bencana/kebakaran, BPBD Kabupaten Gunungkidul mengangkat 6 orang tenaga *outsourcing* (sopir pemadam kebakaran).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, dengan sampel 20 orang yang diambil di lokasi penelitian. Data penelitian ini sendiri diperoleh menggunakan Teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi, sehingga bisa dianalisis menggunakan proses analisis data kualitatif. Data tersebut diolah melalui proses analisis yang melibatkan kolaborasi antara data kualitatif dari penelitian lapangan dan data yang terdapat dalam literatur. Proses analisis ini mencakup pemilihan data yang relevan, sintesa informasi, dan penyusunan pola untuk membentuk kesimpulan yang komprehensif dan dapat dijelaskan dengan baik oleh peneliti dan pihak lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mitigasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 merupakan pertanggung jawaban publik atas kinerja Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan Rencana Strategis tahun 2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BPBD Kabupaten Gunungkidul dengan realisasinya.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Utama/IKU

No	IKU	Indikator Kinerja Utama/IKU	Tahun 2023		Tahun 2024		Target Akhir Renstra (2026)
			Target IKU	Realisasi IKU	Target IKU	Realisasi IKU	
1	Sistem penanggulangan bencana yang terencana, integratif, dan responsif meningkat	Indikator: Presentase masyarakat kalurahan memiliki kemampuan manajemen bencana meningkat Meta indikator: Jumlah kalurahan tangguh bencana terbentuk dibagi jumlah kalurahan x 100%	54,86	60,41	58,33	61,11	65,28
2	Peningkatan manajemen pengurangan risiko bencana/kebakaran	Indikator: Presentase kejadian bencana/kebakaran tertangani Meta indikator: Jumlah kejadian bencana / kebakaran tertangani dibagi jumlah kejadian bencana / kebakaran x 100%	100	100	100	100	100

Sumber : <https://bpbd.gunungkidulkab.go.id>

BPBD telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja BPBD tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan

gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja.

Dalam rangka pencapaian Tujuan Utama, BPBD telah menetapkan Indikator Tujuan Utama yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 369/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 3. Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Rencana Strategis	Indikator / meta indikator	Satuan	Capaian Kinerja			Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	
				2021 2020	2022	2023	Target	Realisasi	Peringkat		Kategori Risiko
1	Sistem Penanggulangan bencana yang terencana, integratif, dan responsif meningkat	Indikator: Presentase masyarakat kalurahan memiliki kemampuan manajemen bencana meningkat Meta indikator: Jumlah kalurahan tangguh bencana terbentuk dibagi jumlah kalurahan x 100%	%		56,94	60,41	58,33	61,11	119,64	Sangat Tinggi	65,28
2	Peningkatan manajemen pengurangan risiko bencana/kebakaran	Indikator: Presentase kejadian bencana/kebakaran tertangani Meta indikator: Jumlah kejadian bencana / kebakaran tertangani dibagi jumlah kejadian bencana / kebakaran x 100%	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	100
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	%	82,25	82,35	83,61	82,5			Sangat Tinggi	83,5
4	Peningkatan dukungan tata ruang kerdmeswari terhadap penanggulangan bencana	Indikator: Presentase dukungan tata ruang kerdmeswari terhadap penanggulangan bencana Meta indikator: Jumlah realisasi kegiatan penyelenggaraan kerdmeswari Yogyakarta urusan tata ruang dibagi jumlah target kegiatan penyelenggaraan kerdmeswari Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana	%	NA	0	25	50	0	0	Sangat Rendah	100

Sumber : <https://bpbd.gunungkidulkab.go.id>

Bencana adalah urusan semua pihak. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul melakukan berbagai kegiatan melalui program kegiatan yang telah direncanakan. Pencapaian target sasaran ini, berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 369/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Guna mencapainya pada tahun anggaran 2024 menargetkan 1 kalurahan terbentuk menjadai kalurahan tangguh bencana. Pelaksanaan kegiatan sudah

dilaksanakan pada bulan Februari 2024 di Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Ponjong.

$$\begin{aligned} \text{Presentase desa rawan bencana memiliki kemampuan manajemen penanggulangan bencana} &= \frac{\text{Jumlah kalurahan tangguh bencana terbentuk}}{\text{Jumlah kalurahan}} \times 100 \\ &= \frac{88 \text{ kalurahan}}{144 \text{ kalurahan}} \times 100 \\ &= 61,11 \end{aligned}$$

Tabel 4. Capaian Sasaran Strategis Sistem Penanggulangan Bencana Yang Terencana, Integratif, Dan Responsif Meningkat

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024			
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	Presentase masyarakat kalurahan memiliki kemampuan manajemen bencana meningkat	58,33	61,11	104,77	Sangat tinggi

Sumber : <https://bpbdb.gunungkidulkab.go.id>

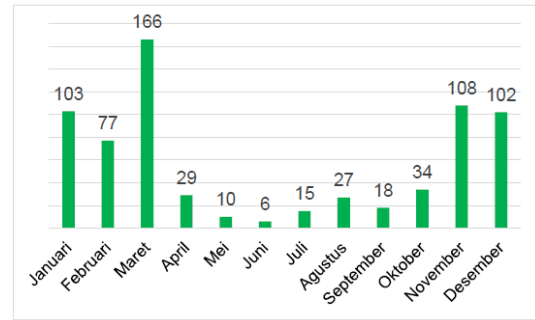
Dari data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 104,77%. Capaian ini termasuk kategori sangat tinggi dengan realisasi 61,11 melebihi dari yang target yang ditetapkan sebesar 58,33.

Realisasi kinerja 61,11 pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2023. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024 Serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024		
1	Presentase masyarakat kalurahan memiliki kemampuan manajemen bencana meningkat	56,94	60,41	61,11	65,28	93,61

Sumber : <https://bpbdb.gunungkidulkab.go.id>



Gambar 3. Grafik Jumlah Kejadian Bencana per Bulan di Tahun 2024

Sumber : <https://bpbdb.gunungkidulkab.go.id>

Pada tahun 2024, Kabupaten Gunungkidul tidak mengalami KLB penyakit/wabah zoonosis. Data warga yang berada di Kawasan bencana dan yang terkena atau menjadi korban bencana yaitu sebanyak

12.082 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Rekapitulasi Korban Bencana

No	Bencana	Korban Bencana (orang)
1	Angin Kencang	689
2	Bangunan Roboh	29
3	Banjir	7
4	Gempa Bumi	82
5	Kebakaran	193
6	Kecelakaan Lain	2
7	Kecelakaan Sumur	2
8	Kecelakaan Sungai	1
9	Tanah Ambles	2
10	Tanah Longsor	304
11	Tersambar Petir	3
12	Kekeringan	10.687
	Jumlah	12.001

Sumber : <https://bpbdb.gunungkidulkab.go.id>

B. Peningkatan Manajemen Pengurangan Bencana/Kebakaran

Kebakaran merupakan salah satu kasus bencana yang menimbulkan kerugian baik berupa materi, luka bahkan hingga kematian. Peristiwa kebakaran merupakan suatu kejadian yang sering terjadi pada pemukiman warga terutama pada musim kering, terkadang kebakaran terjadi pula pada lahan kosong. Karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul yang cenderung kering menjadikan Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu kabupaten di Daerah

Istimewa Yogyakarta yang sering mengalami kebakaran. Selain itu, luasan wilayah Kabupaten Gunungkidul yang mencapai hampir 45% dari wilayah DIY ditambah lagi ketersediaan pos pemadam kebakaran yang hanya 1 pos, menjadi tantangan sendiri dalam pencapaian sasaran strategis Peningkatan Manajemen Pengurangan Risiko Bencana/Kebakaran.

Untuk itu dalam mewujudkan sasaran strategis tersebut, BPBD memiliki UPT Pemadam Kebakaran. UPT Pemadam Kebakaran dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor

94 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan sub urusan kebakaran wajib menyediakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran di UPT Damkarmat Gunungkidul belum sepenuhnya terpenuhi. Sampai dengan triwulan IV Tahun 2024, tersedia 130 unit sarana dan prasarana. Pada tahun anggaran 2024, guna meningkatkan pelayanan pengurangan bencana/kebakaran, BPBD Kabupaten Gunungkidul mengangka 6 orang tenaga *outsourcing* (sopir pemadam kebakaran).

Tabel 7. Sarana Prasarana Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Gunungkidul

No.	Keterangan	Satuan	Tahun						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	Unit	1	1	1	1	1	1	2
2.	Jumlah kendaraan pemadam kebakaran	Unit	4	4	4	4	4	4	6
3.	Jumlah Petugas pemadam kebakaran	Orang	24	24	24	24	24	24	24 THL 6 outsourcing

Sumber : <https://bpbd.gunungkidulkab.go.id>

Tabel 8. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran

No	Penanganan	Jumlah Kejadian
1	Ditangani oleh UPT Damkarmat	95 layanan
2	Ditangani oleh Redkar	15 layanan
	Jumlah	110 layanan

Sumber : <https://bpbd.gunungkidulkab.go.id>

Dari database terkait aspek mutu pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung) diperoleh informasi bahwa pelayanan kebakaran dilakukan oleh UPT Damkarmat dan relawan pemadam kebakaran. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 \text{Presentase kejadian bencana/kebakaran tertangani} &= \frac{\text{jumlah kejadian bencana/kebakaran tertangani}}{\text{jumlah kejadian bencana/kebakaran dalam satu tahun}} \times 100\% \\
 &= \frac{110}{110} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Presentase kejadian bencana/kebakaran tertangani diukur dengan membandingkan jumlah kejadian bencana/kebakaran tertangani dibagi jumlah kejadian bencana/kebakaran dalam satu tahun. Tertangani disini adalah bahwa korban bencana terpantau, tercatat, terbantu dalam keadaan darurat hingga ke tahap rehabilitasi rekonstruksi. Salah satu dari komponen di atas ada, menunjukkan bahwa korban bencana telah dapat tertangani.

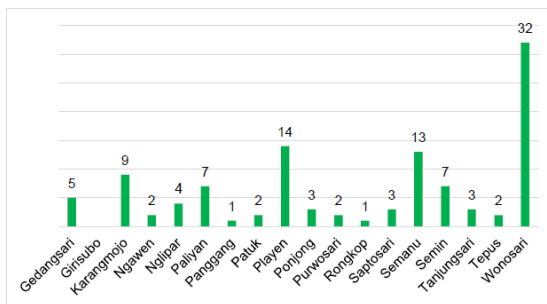
Tabel 9. Evaluasi Pencapaian Sasaran Peningkatan manajemen pengurangan resiko bencana/kebakaran

No	Indikator Kinerja	2022 (%)	2023 (%)	Tahun 2024				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Persentase kejadian bencana/kebakaran tertangani	100	100	100	100	100	Sangat tinggi	100	100
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran						100	Sangat tinggi	100	100

Sumber : <https://bpbdb.gunungkidulkab.go.id>

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program sebesar rata-rata 100 % termasuk kategori sangat tinggi.

C. Sasaran Strategis Peningkatan Manajemen Pengurangan Risiko Bencana/Kebakaran



Gambar 4. Grafik Kejadian Kebakaran Pada Setiap Kapanewon Tahun 2024

Sumber : <https://bpbdb.gunungkidulkab.go.id>

Mutu pelayanan dasar sub urusan kebakaran sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 pasal 3, salah satunya pelayanan tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi. Upaya pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak harus dilakukan sesegera mungkin. Pada Tahun 2024, UPT Damkarmat telah melaksanakan pelayanan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan

evakuasi korban kebakaran dalam waktu tanggap sebanyak 91 kejadian. Dimana rincian rata-rata waktu tanggap sebagai berikut:

Tabel 10. Rincian Rata-Rata Waktu Tanggap/Respon Time

Total Waktu Tanggap	1.127 menit
Total Kejadian Kebakaran	110 kejadian
Rata – rata Respon Time	10,25
Total Kejadian Kebakaran yang Dilayani dalam Respon Time	91 kejadian

Sumber : <https://bpbdb.gunungkidulkab.go.id>

Berdasarkan database kejadian bencana kebakaran sampai dengan triwulan IV tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul terjadi kebakaran sebanyak 111 kejadian dengan Jumlah korban jiwa 193 orang. Sedangkan pada 3 kejadian kebakaran tersebut terdapat warga negara yang terdampak kejadian tersebut (korban jiwa terdampak).

Untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran dilakukan penambahan Pos Pembantu Pemadam Kebakaran yang berlokasi di Kecamatan Karangmojo. Pada tahun 2023, melalui DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul, telah dibangun gedung WMK yang terletak di Kapanewon Karangmojo. WMK Karangmojo ditujukan untuk penambahan layanan Wilayah Manajemen Kebakaran yang dilaksanakan secara bertahap guna mendukung pencapaian target indikator amanat SPM. Pada tahun anggaran dilakukan optimalisasi WMK Karangmojo, antara lain: 1) menambah personel melalui mekanisme outsourcing; 2) menambah mobil pemadam kebakaran dan mobil suplay pemadam kebakaran.

Pada tanggal 16-17 Juli 2024 dilaksanakan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran di Kalurahan

Ngipak, Kapanewon Karangmojo. Tujuan pemilihan Kalurahan Ngipak sebagai pioner pembentukan relawan kebakaran adalah untuk mendukung keberadaan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) Karangmojo.

Pada tahun anggaran 2024 dilaksanakan inspeksi/pendataan peralatan proteksi kebakaran, Sasaran kegiatan sebanyak 15 (lima belas) titik lokasi yang tersebar di wilayah Gunungkidul.

Tabel 11. Hasil Inspeksi Proteksi Kebakaran Tahun 2024

No	Lokasi	Rekomendasi
1	Semin	Kurang APAR CO2, perlu pelatihan/simulasi pemadaman kebakaran
2	SMKN I Girisubo	13 unit gedung belum ada APAR, 2 unit APAR expired, perlu pelatihan/simulasi pemadaman kebakaran
3	SMKN 1 Tepus	Perlu penambahan APAR CO2 5 buah, perlu pelatihan/simulasi pemadaman kebakaran
4	Drini Park	Penambahan rambu jalur evakuasi, perlu pelatihan/simulasi pemadaman kebakaran
5	Heha Ocean View	-
6	SMP Al Azhar Wonosari	Perlu penambahan APAR CO2 2 buah
7	Drini Hills	APAR yang ada DCP, direkomendasikan APAR CO2
8	SMK N 1 Ponjong	Perlu penambahan APAR CO2 7 buah
9	SMK M Ngawen	Perlu penambahan APAR CO2 4 buah
10	SPBU Ngawen	-
11	Kampus UGK	Perlu pelatihan/simulasi pemadaman kebakaran
12	SPBU Semin	-
13	SMK M Semin	Perlu penambahan APAR CO2 3 buah
14	SMA N 1 Semin	APAR yang rusak harap diperbaiki
15	Edge Hotel Purwosari	Perlu pelatihan/simulasi pemadaman kebakaran

Sumber : <https://bpbdd.gunungkidulkab.go.id>

Permasalahan Pencapaian Sasaran Strategis Peningkatan Manajemen Pengurangan Risiko Bencana/ Kebakaran: 1) Ketersediaan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)/pos pemadam kebakaran belum sesuai dengan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK); 2) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Pemadam Kebakaran; Terbatasnya sarana prasarana pemadam kebakaran/ penyelamatan *non* kebakaran; 4) Terbatasnya anggaran pemadam kebakaran/penyelamatan *non* kebakaran; 5) Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Solusi Pencapaian Sasaran Strategis Peningkatan Manajemen Pengurangan Risiko Bencana/ Kebakaran: 1) Memberikan kemampuan kepada masyarakat di dalam menanggulangi kebakaran di tingkat lingkungan; 2) Meningkatkan kegiatan edukasi/sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana mengenal kebakaran dan proses penanggulangan kebakaran dan pencegahannya, pengenalan alat-alat pemadaman, dan cara penggunaannya; 3) Memberikan bantuan teknis melalui pemberian peralatan dan pelatihan penggunaannya; 4) Implementasi pemberdayaan masyarakat yang bersifat wajib bagi pemilik bangunan gedung dan bersifat sukarela; 5) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Pemadam kebakaran melalui diklat teknis; 6) Penambahan sarana prasarana pemadam kebakaran; 7) Berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait tentang penambahan SDM pemadam kebakaran.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Gunungkidul terhadap bencana kebakaran melibatkan beberapa tahapan. Pertama, BPBD menunggu informasi dari perangkat desa terkait terjadinya kebakaran sebelum memberikan respon cepat. Setelah menerima informasi, BPBD segera menginformasikan kepada para pemangku kepentingan untuk bantuan penanganan, dan menyiapkan transportasi serta perlengkapan yang diperlukan.

Personel TRC dan SATGAS dikerahkan setelah BPBD mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memastikan keselamatan selama penanggulangan bencana. Setelah persiapan selesai, BPBD segera menuju

lokasi bencana untuk melakukan evakuasi korban ke tempat yang lebih aman dan mendirikan posko darurat serta dapur umum. BPBD juga melaporkan situasi bencana ke BPBD pusat untuk mendapatkan bantuan tambahan. Setelah kebakaran, BPBD melakukan rehabilitasi infrastruktur yang rusak berdasarkan survei yang dilakukan dan laporan yang diajukan ke BPBD pusat. Rehabilitasi ini dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Gunungkidul beberapa minggu setelah kebakaran selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Absor, M. U. (2011). Penanganan Anak Dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Alam: Tinjauan Konvensi Hak Anak Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Dakwah*, Vol. Xi,(1), 17 32.
- Almualim, Y. K. A. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) (2024). Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Kebakaran.
- Derivan Sunarya, E. S. (2023). Strategi Penanganan Kebakaran Di Kampung babakan Bandung Desa Leuwisadeng kecamatan Leuwisadeng.
- Hastiningrum Sma Negeri, D., Angsana, J., Selatan, K., & Tengah, J. (2019). Kebijakan Sekolah Berwawasan Lingkungan Dan Mitigasi Bencana (Swaliba) Di Sma Negeri 2Klaten. *September*, 161 170.
- Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (Jp Dan Kp)*, 2(2), 139 146. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1088>
- Manik, T. K., Rosadi, B., Sanjaya, P., & Perdana, O. K. (2017). Resiko Bencana; Kajian Kerentanan, Kapasitas Dan Pemetaan Risiko Bencana Akibat Perubahan Iklim.
- M Belqis. (2023). Pemberdayaan Remaja Dengan Sosialisasi Manajemen Bencana Untuk Meningkatkan Pengetahuan dalam Mengadapi Bencana Gunung Raung di Dusun Panjen.
- Mokoginta, L. A., Antow, D. T., & ... (2022). Kajian Yuridis Kedudukan Dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Bnpb) Dalam Menanggulangi Korban Bencana
- Nurrahmah, W. (2015). Studi Fenomenologi Pengalaman Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Kebakaran di RT 001 RW 012 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan Tahun 2015.
- Perry, R. W., Lindell, M. K., & Tierney, K. J. (Eds.). (2001). *Facing the unexpected: Disaster preparedness and response in the United States*. Joseph Henry Press.
- Putra, A. H. (2022). Analisis Bahaya Bencana Kebakaran Dan Kerentanan Infrastruktur Di Nagari Guguak Sarai Kecamatan Sungai Lasi Kabupaten Solok.
- Ramadhan, E. H. F., Sukmana, O., & Habib, A. (2023). Pemulihan Sosial Berbasis Pelayanan Sosial Muhammadiyah Pasca Bencana 2022. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 292 315. <https://doi.org/10.30738/Sosio.V9i2.15362>
- Resdiana, E., & Alfiyah, N. I. (2020). Upaya Peningkatan Kesadaran, Kewaspadaan Dan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapai Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep. *Public Corner*, 14(2), 26 38. <https://doi.org/10.24929/Fisip.V14i2.890>
- R. Rijanta, D.R. Hizbaron, M. B. (2018). *Modal Sosial Dalam Manajemen Bencana*.
- Sabir, A., & Phil, M. (2016). Gambaran Umum Persepsi Masyarakat Terhadap Bencana Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*, 5(3), 304 326.
- Sari, A. A., Sabilla, A. A., & Hertati, D. (2020). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bencana Kebakaran Di Kabupaten Gresik. *Syntax*, 2(5), 21-35.
- Setiawan, M. I., & Budiyanto, H. (2015). Pengembangan bangunan *air inflated structure* sebagai fasilitas tanggap

- bencana. In Seminar Nasional Teknologi (Senatek) (pp873-880).
- Syukur, A. (2021). Buku Pintar Penanggulangan Bencana.
- Wahyuni, S., Pujiastuti, D., Fitriani Sani, L., & Rahayu, A. (2015). Tinjauan Keadaan Klimatologi Pada Kebaran Kota Padang Tanggal 24 Juli 2012. Jurnal Fisika Unand, 4(4), 405-413.
- Zata Ismah. (2021). Epidemiologi Demam Berdarah Kota Surabaya.